



TRIBUN-SULBAR.COM,MAMUJU - Kejaksaan Negeri (Kejari) [Mamuju](#) segera memanggil sejumlah aparat [Desa Tanambuah](#), Kecamatan Sampaga, Kabupaten [Mamuju](#), Sulawesi Barat (Sulbar).

Pemanggilan tersebut buntut laporan warga soal kasus dugaan korupsi bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

Laporan ke kejaksaan lantaran beberapa warga belum menerima [BLT](#) tersebut.

Kasi Intel Kejari [Mamuju](#) Andy Nugroho menyatakan, pihaknya baru saja memeriksa 10 saksi. Selanjutnya akan memanggil kepala desa dan beserta aparat desa.

"Iya selanjutnya kita panggil kadesnya dan aprat desa untuk diperiksa," ungkap Andy saat dihubungi [Tribun-Sulbar.com](#), Sabtu (14/1/2023).

Kasi Intel Kejari [Mamuju](#) Andy Nugroho menyatakan, pihaknya baru saja memeriksa 10 saksi.

Selanjutnya akan memanggil kepala desa dan beserta aparat desa.

"Iya selanjutnya kita panggil kadesnya dan aprat desa untuk diperiksa," ungkap Andy saat dihubungi [Tribun-Sulbar.com](#), Sabtu (14/1/2023).

"Kita masih periksa seputar laporan warga dan pemberitaan di media, soal kades tak memberikan [BLT](#) kepada warga," bebernya.

Namun, Andy belum menyebutkan apakah ada tersangka atau tidak karena proses pemeriksaan sementara masih berlanjut.

"Nanti kita lihat setelah hasil pemeriksaan dari semua pihak," bebernya.

Sebelumnya, sejumlah warga [Desa Tanambuah](#), Kecamatan Sampaga, Kabupaten [Mamuju](#), Sulawesi Barat (Sulbar), melaporkan kepala desa ke polisi.

Hal itu buntut warga tidak menerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) selama delapan bulan.

Warga Tanambuah Julianti mengaku, ada 12 warga yang hingga saat ini belum menerima [BLT](#) tersebut.

"Ada warga tidak terima (BLT [dana desa](#)) selama tiga bulan, dua bulan dan paling lama itu delapan bulan sejak Januari hingga Agustus 2022 kemarin," ungkap Julianti saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon seluler, Jumat (6/1/2023).

Julianti mengaku, ia melaporkan kepala desanya ke polisi pada 28 Desember 2022 lalu bersama dengan warga tidak menerima bantuan.

"Ada 12 warga yang tidak menerima bantuan kasian, kita kesana meminta hak kami karena nama ada dalam data sebagai penerima. Ternyata saat kami ke kantor desa tidak diberikan," keluhnya.(*)